

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (Sukmaningrum, 2012).

Menurut Bastian (2010), Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Sorotan utama masyarakat pada sektor publik atau pemerintahan adalah mengenai tata kelola keuangan negara. Pemerintah dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan bersih, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tercapainya tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai *stakeholder* dari negara (Handayani, 2012).

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014 disampaikan Kepala Perwakilan, BPK Provinsi Lampung V.M. Ambar Wahyuni kepada Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Naldi Rinara dan Walikota Bandar Lampung, Herman HN di auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi Lampung, 7 April 2015.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan mengatakan bahwa Laporan Keuangan adalah tanggungjawab Pemerintah Kota Bandar Lampung, sedangkan

tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas pemeriksaan yang telah dilakukan, berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

“Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” dan ditahun 2015 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kali pada masa kepemimpinan Wali Kota Herman HN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2015. (www.bpkgo.id)

Kepala Perwakilan berharap opini WTP kelima kalinya secara berturut-turut ini dapat dipertahankan dan dapat diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Semoga opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan, dan yang lebih penting lagi, opini yang dicapai dapat diwujudkannyatakan dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung secara adil dan merata,” tegas V.M. Ambar Wahyuni

Dari hasil pemeriksaan pada BPK RI atas laporan keuangan Semester II Tahun 2015 pada Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya 2 kasus kelemahan SPI terhadap Belanja Daerah terdiri atas 2 kelompok temuan yaitu kelemahan 1 Perencanaan kegiatan tidak memadai, 1 Lain-lain kelemahan sistem pengendalian internal (BPK, IHPS, Semester II, 2015).

Implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual TA 2014 sampai dengan triwulan III tahun 2015 pada Pemrov masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu penyusunan roadmap implementasi SAP berbasis akrual tidak melibatkan semua kepala satuan kerja. Selain itu belum menginternalisasi perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan terdapat regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual yang belum selaras dengan peraturan lainnya. Kebijakan dan sistem akuntansi belum seluruhnya diimplementasikan, pemuktahiran database SDM belum optimal juga tidak melaksanakan analisis kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk setiap hari dan fungsi. Ambar juga

menyebutkan SDM pengelola keuangan aset dan TI belum semua memiliki kompetensi, bahkan optimalisasi pengelola keuangan, aset TI belum memadai. Selain itu, Bandar Lampung juga perlu mendapat perhatian yaitu belum mempunyai rencana/strategis dalam implementasi SAP berbasis akrual, para kepala satuan kerja belum mendapat pernyataan tertulis untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual. BPK juga menyorot sistem aplikasi yang dimiliki tidak terintegrasi vertikal dan horizontal.(www.teraslampung.com)

Berdasarkan fenomena tersebut maka diketahui bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh efektivitas penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Menurut Robert & Vijay yang dikutip dari Nurlaila (2014), dikatakan bahwa efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu guna dalam peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah (Nurlaila, 2014).

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Yosefrinaldi, 2013).

Selanjutnya faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Teknologi Informasi (TI) dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara (Surastiani, 2015).

Faktor lainnya yaitu sistem pengendalian internal. Pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI (Sistem Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Sistem pengendalian internal dilakukan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, untuk menghindari dari kecurangan manipulasi angka-angka yang dapat merugikan masyarakat dan Negara, serta memastikan akurasi dan kelengkapan informasi (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan pernah dilakukan oleh Nurlaila (2014) dan hasilnya menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu penelitian tentang kualitas laporan keuangan juga pernah dilakukan oleh Humairoh (2013) dan hasilnya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2016), yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan instansi. Akan tetapi hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), yang menyatakan bahwa hanya sistem pengendalian internal yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sumber daya manusia tidak

berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) juga bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2015). Penelitian yang dilakukan Ashari (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan instansi.

Berdasarkan hasil penelitian yang bertolak belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji ulang variabel efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012), dengan judul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Selain itu, penelitian ini menggabungkan dari penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2016) . Adapun judulnya adalah: “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi Informasi Terhadap Laporan Keuangan Instansi dan hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini menggabungkan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila (2014), dengan judul: Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dan hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu: Sukmaningrum (2012) menjadikan Pemerintah

Kabupaten dan Kota Semarang sebagai objek penelitian, Ashari (2016) menjadikan Resimen Artileri Medan 2/1 Kostrad purwakarta sebagai objek penelitian dan Nurlaila (2014), menjadikan Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai objek penelitian, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah SKPD di Bandar Lampung. Dengan demikian penelitian ini akan dilakukan dengan judul: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Studi Pada SKPD Kota Bandar Lampung)”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Subjek dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan.
2. Objek dalam penelitian ini adalah SKPD di Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi guna meningkatkan kualitas laporan khususnya SKPD di Kota Bandar Lampung.
2. Bagi akademis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang akan membahas topik berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta bangunan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA